

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

Yoga Catur Wicaksono

Banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI. Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Menurut Pasal 108 ayat 1 Undang-undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, sehingga hak paten yang menjadi objek jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga Jaminan Fidusia selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa hak paten bisa dijadikan sebagai jaminan hutang menggunakan lembaga fidusia serta Bagaimanakah proses terjadinya pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hak paten termasuk sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis maka hak paten dapat dijadikan sebagai objek hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia dan dengan pembebanan jaminan sesuai dengan undang-undang fidusia yang berlaku. Penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran jaminan harus membuat permohonan pendaftaran seperti salinan akta jaminan, surat keterangan bukti jaminan, dan membayar biaya pendaftaran berdasar peraturan pemerintah, kemudian kantor pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan kwintasi pembayaran yang telah dicap stempel dan ditandatangani oleh bendahara. Data-data yang telah diterima diproses kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan yang isinya merupakan data-data yang sudah diisi dalam permohonan pendaftaran. Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF PATENT RIGHTS AS FIDUSIA GUARANTEE BASED ON LAW PROVISIONS NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIA GUARANTEE

Many countries get the large economic benefits from Intellectual Property Rights (IPR) products. The reason why they could get these economic benefits is because IPR can be sold, licensed, and used as an object of debt guarantee. According to Article 108 paragraph 1 of Law No. 13 of 2016 concerning Patents, it states that "The right to patent can be used as an object of fiduciary guarantee", so that the patent that is the object of fiduciary guarantee is not a guarantee right that born under the law, however it was born because it has to be agreed in advance between the Fiduciary Guarantee Institution as the creditor and the customer as the debtor. The problem of the study in this research is why Patents can be used as collateral for debt using fiduciary institutions and how the process of the binding of patents as a fiduciary guarantee and how the legal consequences for the debtor who did defaults.

The research methodology used in this study is normative law with a descriptive research where the problem approach carried out in a normative juridical. The data sources used in this research are primary and secondary data. Thus, the data collection technique used is library study. Moreover, all of the data collected both from primary and secondary data are analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, Patents are included as flexible objects that are intangible and have economic value so that patents can be used as objects of debt by using fiduciary guarantee institutions and by imposing guarantees in accordance with applicable fiduciary law. Fiduciary recipients in making a guarantee registration must make an application for registration such as a copy of the guarantee certificate, proof of guarantee certificate, and pay the registration fee based on the government regulations, then the fiduciary guarantee registration office will provide payment that has been stamped and signed by the treasurer. The data that has been received is processed then the fiduciary registration office publish a guarantee certificate, the contents of which are filled previously in the registration application. If there is a party that is conducting a default it will lead to the execution of fiduciary guarantees.

Keywords: Patent, Collateral, Fiduciary